

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

AP Parlindungan, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Penerbit Alumni, Bandung, 1973.

Bagus Prasetyo, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dikaitkan dengan Kewenangan Notaris dalam Legalisasi dan Waarmerkeing berdasarkan UU No.20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Boedi Harsono I., *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi Revisi)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005

IGN. Sugangga, *Pengantar Hukum Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

Imam Soetiknyo, *Proses Terjadinya UUPA*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.

Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

S. Chandra, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

## **C. Jurnal**

Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>.

(02/04/2011), diakses pada 20 Januari 2017.

